

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

# LKjIP 2022



DINAS **PERTANIAN**  
DAN **PERKEBUNAN**  
Pemerintah Provinsi  
Jawa Tengah

distanbun\_Jtg



DistanbunJtg



DistanbunJateng



distanbun.jatengprov.go.id



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2022. LKjIP SKPD merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran. Proses kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Provinsi Jawa Tengah



SUPRIYANTO, SP., MP.  
NIP. 19671023 199701 1 002

# I. PENDAHULUAN

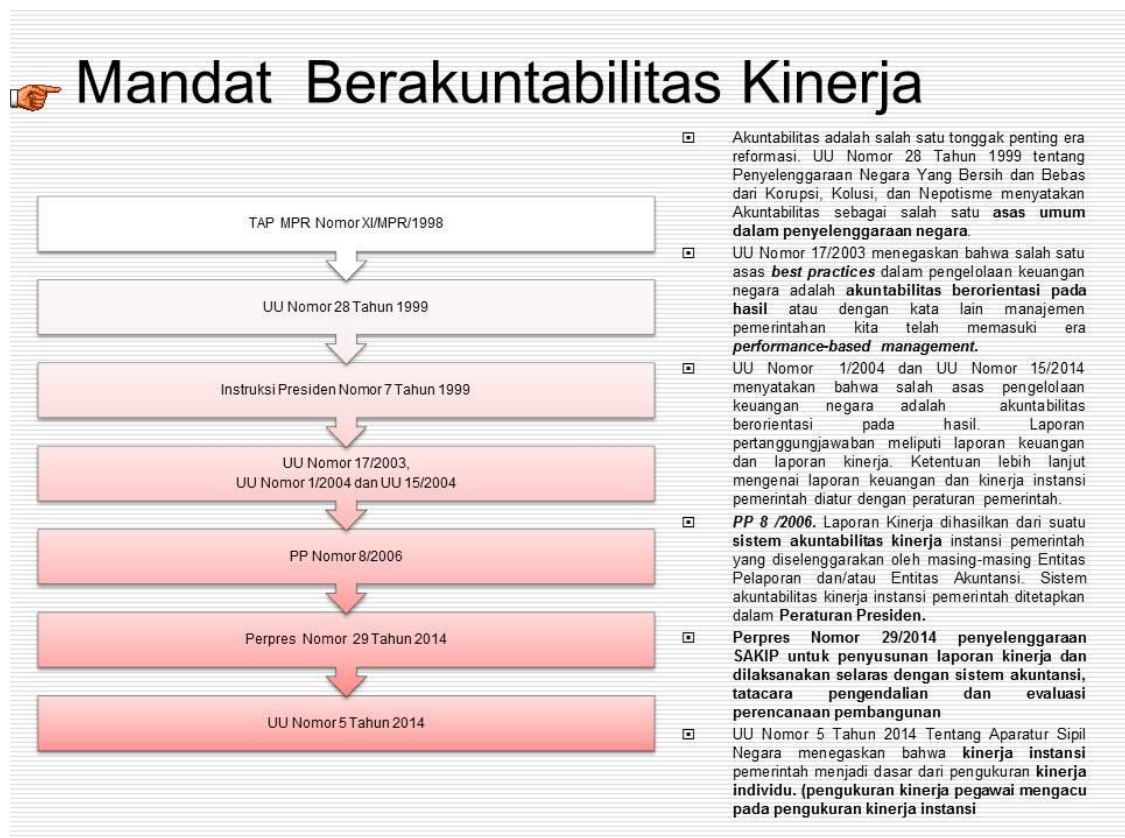
## 1.1 Latar Belakang

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dan meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian.” Misi ini bertujuan mewujudkan desa mandiri/berdikari melalui kedaulatan pangan dan energi. Hal ini sejalan dengan salah satu Nawa Cita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menggerakkan sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara akuntabel, dengan mengukur hasil-hasilnya baik secara fisik maupun finansial. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Sistem AKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2015). Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas perencanaan yang telah ditetapkan. Inpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Rencana Strategis (tujuan dan sasaran strategis organisasi, kebijakan/program dan indikator kinerja), mengukur keberhasilan organisasinya melalui seperangkat indikator kinerja

yang ditetapkannya sendiri, dan melaporkan akuntabilitas kinerjanya. Dasar hukum tertera pada gambar 1.



Gambar 1. Dasar Hukum Sistem AKIP

## 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

### 1.2.1 Kedudukan

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah merupakan dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

### 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

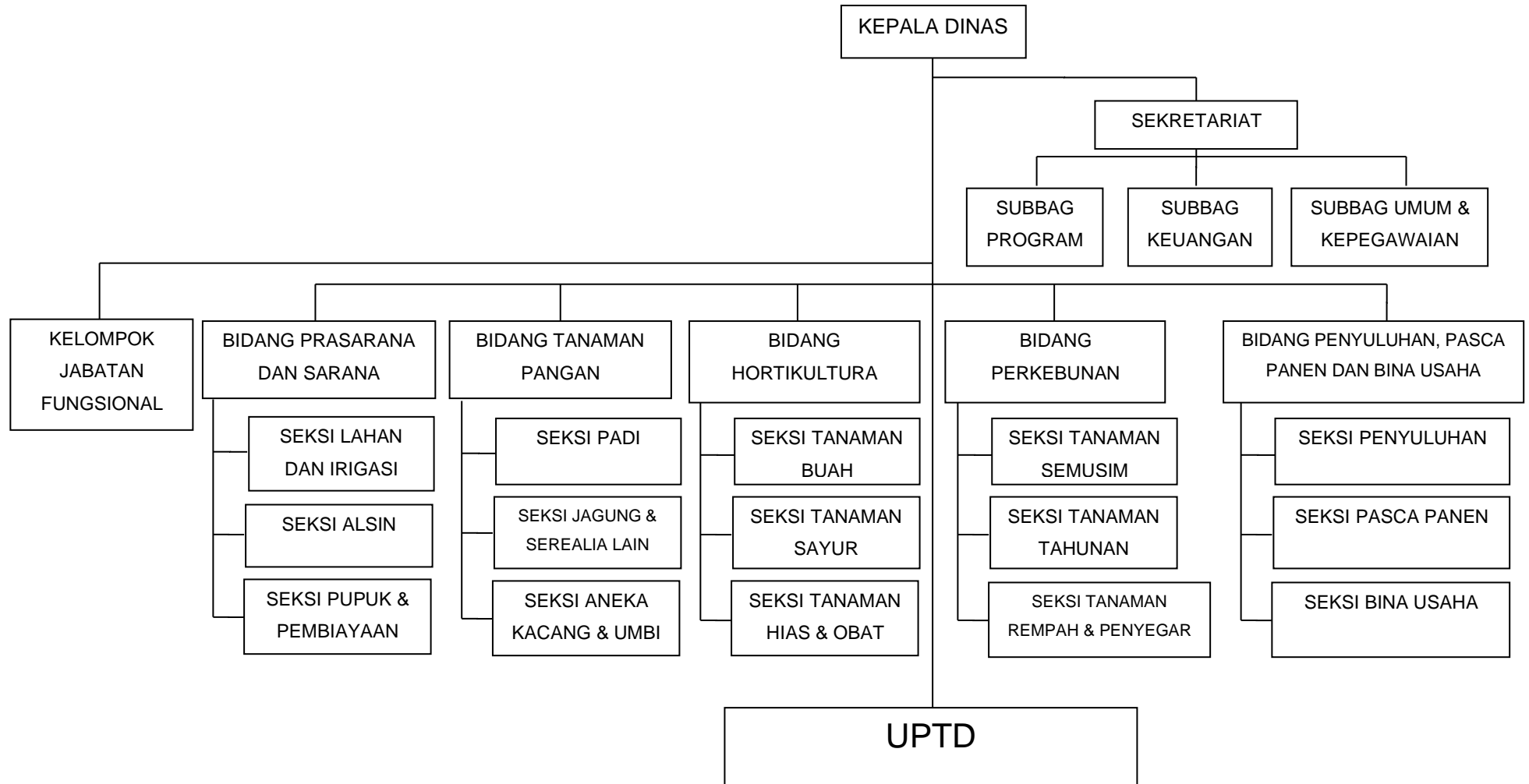
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah antara lain: melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 antara lain meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

## Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah



### 1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Pada Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Perkebunan fokus pada pencapaian sasaran utama, "Memantapkan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai Wujud Kontribusi Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah," yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pertanian dan perkebunan.

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut, meliputi:

1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan;
3. Optimalisasi kebun benih benih dan sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat;
4. Melaksanakan penambahan/rehabilitasi indfrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui modernisasi pertanian;
6. Meningkatkan pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran;
7. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8. Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani.

Sedangkan kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran adalah:

1. Penerapan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mendukung kegiatan asuransi bagi petani;
3. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan;
4. Penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) dalam rangka mendukung pengembangan pertanian organik;
5. Penyebaran benih bermutu bersertifikat melalui Balai Benih dan Optimalisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB);
6. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan;
7. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran;
8. Menyiapkan dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan;
9. Menyiapkan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Masih lemahnya kelembagaan usahatani;
3. Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan;
4. Belum optimalnya kualitas produk segar, produk olahan maupun produk organik;
5. Masih terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi;
6. Belum optimalnya perlindungan terhadap petani.

**Tabel 1.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja**  
**Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah	1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (ton): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Padi 11.804.686</li> <li>▪ Jagung 3.704.460</li> <li>▪ Kedelai 109.512</li> </ul> Peningkatan Produksi Hortikultura (ton): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawang merah 593.756</li> <li>▪ Cabe besar 226.024</li> </ul> Peningkatan Produksi Perkebunan (ton): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tebu 2.978.255</li> <li>▪ Kelapa 166.724</li> <li>▪ Kopi 22.093</li> </ul>	
	2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah peningkatan SDM pertanian dan perkebunan	3.600
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat distanbun	63,50
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Distanbun	76

#### 1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2022 terdiri dari 4 bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan rincian sebagai berikut:

### **Bab I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

### **Bab IV. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan RPJMD Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018-2023.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

#### 1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah :

#### **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI**

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa tengah Tahun 2013 – 2018.

Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

##### a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa ada nya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi.

Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

## 2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

### 1. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk

saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

## **2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan kabupaten/kota**

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapus*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan

tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

### **3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.**

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan

keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

#### **4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan**

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan

norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

### **3. Tujuan**

- a. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah;
- b. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

### **4. Sasaran**

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;
- b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pertanian dan perkebunan;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pertanian dan Perkebunan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Padi Jagung Kedelai Bwg. Merah Cabe Besar Tebu Kopi Kelapa	11.543.015 3.660.360 102.726 528.537 200.836 2.934.025 20.482 164.248	11.629.588 3.675.002 104.940 550.276 209.232 2.948.695 21.019 165.069	11.716.810 3.689.702 107.201 572.016 217.628 2.963.438 21.556 165.895	11.804.686 3.704.460 109.512 593.756 226.024 2.978.255 22.093 166.724	11.893.221 3.719.278 111.872 615.495 234.420 2.993.147 22.629 167.558
		Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah peningkatan SDM pertanian dan perkebunan	3.450	3.510	3.570	3.600	3.690
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	60	61,50	63	63,50	64
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Distanbun	75	75,40	75,70	76	76,20

## 2.2 Perencanaan Kinerja

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018-2023, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Padi Jagung Kedelai Bwg. Merah Cabe Tebu Kopi Kelapa	Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	11.804.686 3.704.460 109.512 593.756 226.024 2.978.255 22.093 166.724
		Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah peningkatan SDM pertanian dan perkebunan	Orang	3.600
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	63,50
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Distanbun	Angka	76

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perjanjian kinerja Tahun 2022 dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Perjanjian berisikan tentang tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Gubernur melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tersebut disusun selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tersaji pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Lampiran Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>Tujuan 1</b>	Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah	Pertumbuhan sub sektor pertanian dan perkebunan	1,12
<b>Sasaran 1</b>	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Padi Jagung Kedelai Bawang merah Cabe Besar Tebu Kopi Kelapa	11.804.686 3.704.460 109.512 593.756 226.024 2.978.255 22.093 166.724
<b>Sasaran 2</b>	Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pertanian dan perkebunan	Jumlah peningkatan SDM pertanian	3.600
<b>Tujuan 2</b>	Meningkatkan tata kelola Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	63,50
<b>Sasaran 1</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	63,50
<b>Sasaran 2</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Distanbun	76

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah</li> <li>- Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD</li> </ul>	<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p>	94.762.295.000
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai</li> <li>- Persentase peningkatan produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe</li> <li>- Persentase peningkatan produksi kopi, tebu, kelapa</li> <li>- Persentase penambahan jumlah alsintan</li> <li>- Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani di Jawa Tengah</li> <li>- Persentase penyaluran pupuk subsidi</li> <li>- Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolah hasil</li> <li>- Persentase layanan sertifikasi benih</li> <li>- Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang</li> <li>- Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Surakarta</li> <li>- Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas</li> <li>- Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">2,90%</p> <p style="text-align: center;">10,80%</p> <p style="text-align: center;">3,10%</p> <p style="text-align: center;">4%</p> <p style="text-align: center;">5%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">2,50%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">3%</p> <p style="text-align: center;">3%</p> <p style="text-align: center;">3%</p> <p style="text-align: center;">3%</p>	78.576.307.000
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase produk tembakau yang diserap pasar</li> <li>- Persentase jaringan irigasi yang baik</li> </ul>	<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">18,38%</p>	8.044.440.000

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
4	Penyuluhan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitas nya</li> <li>- Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian</li> </ul>	<p style="text-align: center;">10%</p> <p style="text-align: center;">100%</p>	10.604.413.000
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)</li> </ul>	0,45%	1.528.572.000

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Proses pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada capaian pengukuran hasil Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama. Pengukuran ini merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja utama (tabel 6) dan kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Pengukuran keberhasilan capaian sasaran strategis dan target organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan strategis, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagai Berikut:

No	Kategori	Skala Capaian
1	Sangat baik	$\geq 91\%$
2	Baik	76 – 90,99%
3	Cukup	66 – 75,99%
4	Kurang	51 – 65,99%
5	Sangat Kurang	$\leq 50,99\%$

Pada tahun 2022, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang harus diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yaitu:

**Sasaran Strategis :**

- 1. Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan**
- 2. Terwujudnya Peningkatan Kemampuan SDM Pertanian dan Perkebunan**
- 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah**
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Tolok ukur capaian sasaran strategis terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan terdiri dari 17 indikator yaitu:

1. Produksi padi
2. Produksi jagung
3. Produksi kedelai
4. Produksi bawang merah
5. Produksi cabe besar
6. Produksi tebu
7. Produksi kopi
8. Produksi kelapa
9. Produksi kacang tanah
10. Produksi kacang hijau
11. Produksi ubi kayu
12. Produksi ubi jalar
13. Produksi durian
14. Produksi mangga
15. Produksi salak
16. Produksi melati
17. Produksi jahe

Tolok ukur capaian sasaran strategis terwujudnya peningkatan kemampuan SDM pertanian dan perkebunan terdiri dari 1 indikator yaitu Peningkatan SDM Pertanian dan Perkebunan.

Tolok ukur capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah terdiri dari 1 indikator yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat.

Tolok ukur capaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja perangkat daerah terdiri dari 1 indikator yaitu Nilai SAKIP Distanbun.

Untuk mengukur capaian kinerja pada 4 sasaran strategis tersebut dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

### 1. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan

**Tabel 3.1**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023 (Ton)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Padi	9.618.657	11.804.686	9.512.547	80,58	11.893.221	79,98
2	Produksi Jagung	3.598.264	3.740.460	3.719.441	99,44	3.719.278	100,00
3	Produksi Kedelai	46.949	109.512	61.198	55,88	111.872	54,70
4	Produksi Bawang Merah	519.271	593.756	510.928	86,05	615.495	83,01
5	Produksi Cabe Besar	174.705	226.024	185.156	81,92	234.420	78,98
6	Produksi Tebu	2.603.736	2.978.255	2.615.697	87,83	2.993.147	87,39
7	Produksi Kopi	26.549	22.093	26.213	118,65	22.629	115,84
8	Produksi Kelapa	170.688	166.724	170.061	102,00	167.558	101,49
9	Produksi Kacang Tanah	71.247	100.845	69.788	69,20	102.376	68,17
10	Produksi Kacang Hijau	112.343	114.430	32.325	28,25	117.233	27,57
11	Produksi Ubi Kayu	2.819.226	3.746.912	2.843.573	75,89	3.892.656	73,05
12	Produksi Ubi Jalar	135.593	188.099	145.302	77,25	196.175	74,07
13	Produksi Durian	1.591.994	61.832	203.122	328,51	62.141	326,87

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023 (Ton)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian		
14	Produksi Mangga	457.674	465.083	471.379	101,35	467.408	100,85
15	Produksi Salak	432.097	507.184	744.800	146,85	509.720	146,12
16	Produksi Melati	18.113	23.643	21.574	91,25	23.667	91,16
17	Produksi Jahe	41.513	31.699	57.990	182,94	31.731	182,76
<b>Persentase Capaian Sasaran Strategis</b>					<b>85,97%</b>		<b>85,02%</b>

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan tercapai sebesar 85,97% dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2023 tercapai sebesar 85,02% dengan kategori baik.

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Secara lebih rinci pencapaian sasaran dari indikator kinerja adalah sebagaimana dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

#### a. Capaian Indikator Sasaran Produksi Padi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023 (Ton)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Padi	9.618.657	11.804.686	9.512.547	80,58	11.893.221	79,98

Indikator kinerja sasaran produksi padi tercapai 9.512.547 ton dari target 11.804.686 ton (80,58%). Produksi padi tidak mencapai target dikarenakan adanya pergeseran masa tanam dan penurunan produktivitas yang dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim yang menyebabkan bencana banjir dan puso pada beberapa wilayah. Upaya pencapaian target kinerja sasaran tersebut

dengan melaksanakan program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu melalui indikator program persentase peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dengan capaian 2,55% dari target 2,90% (87,93%) dan indikator kegiatan pengembangan padi dengan capaian 2.000 ha sesuai target (100%). Upaya pencapaian target peningkatan produksi padi yaitu optimalisasi pengembangan kawasan padi, penerapan kebijakan Indeks Pertanaman (IP) 400 dengan metode tanam 4 kali dalam 1 tahun pada lahan yang sama, dan fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada lahan yang terkena bencana.

b. Capaian Indikator Sasaran Produksi Jagung

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023 (Ton)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Jagung	3.598.264	3.740.460	3.719.441	99,44	3.719.278	100,00

Indikator kinerja sasaran produksi jagung tercapai 3.719.441 ton dari target 3.740.460 ton (99,44%). Produksi jagung tidak mencapai target dikarenakan adanya pergeseran masa tanam yang dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim yaitu curah hujan yang tinggi. Upaya pencapaian target kinerja sasaran tersebut dengan melaksanakan program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu melalui indikator program persentase peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dengan capaian 2,55% dari target 2,90% (87,93%) dan indikator kegiatan pengembangan jagung dengan capaian 800 ha sesuai target (100%). Upaya pencapaian target peningkatan produksi jagung yaitu optimalisasi pengembangan kawasan jagung dan penerapan kebijakan Indeks Pertanaman (IP) 400 dengan metode tanam 4 kali dalam 1 tahun pada lahan yang sama.

c. Capaian Indikator Sasaran Kedelai

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023 (Ton)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Kedelai	46.949	109.512	61.198	55,88	111.872	54,70

Indikator kinerja sasaran produksi kedelai tercapai 61.198 ton dari target 109.512 ton (55,88%). Produksi kedelai tidak mencapai target dikarenakan berkurangnya minat petani dalam menanam kedelai karena harga jual yang relatif rendah yang tidak sebanding dengan proses budidaya dan perawatan yang lebih rumit dari komoditas lain. Upaya pencapaian target kinerja sasaran tersebut dengan melaksanakan program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu melalui indikator program persentase peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dengan capaian 2,55% dari target 2,90% (87,93%) dan indikator kegiatan pengembangan kedelai dengan capaian 330 ha sesuai target (100%). Upaya pencapaian target peningkatan produksi kedelai yaitu optimalisasi pengembangan kawasan kedelai beserta dukungan pemasarannya agar bernilai jual tinggi sehingga dapat meningkatkan minat petani.

d. Capaian Indikator Sasaran Bawang Merah

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023 (Ton)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Bawang Merah	519.271	593.756	510.928	86,05	615.495	83,01

Indikator kinerja sasaran produksi bawang merah tercapai 510.928 ton dari target 593.756 ton (86,05%). Produksi bawang merah tidak mencapai target dikarenakan adanya penurunan produktivitas yang dipengaruhi oleh dampak

perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Upaya pencapaian target kinerja sasaran tersebut dengan melaksanakan program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu melalui indikator program persentase peningkatan produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe dengan capaian 10,80% sesuai target (100%) dan indikator kegiatan pengembangan bawang merah dengan capaian 2 ha sesuai target (100%). Upaya pencapaian target peningkatan produksi bawang merah yaitu optimalisasi pengembangan kawasan bawang merah dengan menggunakan varietas benih unggul dan pengendalian hama terpadu agar tanaman tahan terhadap serangan OPT sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

e. Capaian Indikator Sasaran Cabe Besar

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023 (Ton)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Cabe Besar	174.705	226.024	185.156	81,92	234.420	78,98

Indikator kinerja sasaran produksi cabe besar tercapai 185.156 ton dari target 226.024 ton (81,92%). Produksi cabe tidak mencapai target meskipun ada peningkatan dibandingkan tahun lalu dikarenakan adanya perubahan pola tanam dari monokultur menjadi tumpang sari sehingga menurunkan produktivitas. Upaya pencapaian target kinerja sasaran tersebut dengan melaksanakan program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu melalui indikator program persentase peningkatan produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe dengan capaian 10,80% sesuai target (100%) dan indikator kegiatan pengembangan bawang merah dengan capaian 15 ha sesuai target (100%). Upaya pencapaian target peningkatan produksi cabe besar yaitu optimalisasi pengembangan kawasan cabe besar dengan menerapkan pola tanam monokultur dan pengendalian hama terpadu agar tanaman terhindar dari serangan OPT yang merupakan resiko dari pola tanam monokultur.

f. Capaian Indikator Sasaran Tebu

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023 (Ton)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Tebu	2.603.736	2.978.255	2.615.697	87,83	2.993.147	87,39

Indikator kinerja sasaran produksi tebu tercapai 2.615.697 ton dari target 2.978.255 ton (87,83%). Produksi tebu tidak mencapai target meskipun ada peningkatan dibandingkan tahun lalu dikarenakan adanya penurunan produktivitas akibat usia tanaman (ratoon) yang sudah tua dan dampak perubahan iklim, serta berkurangnya minat petani karena biaya produksi yang relatif tinggi. Upaya pencapaian target kinerja sasaran tersebut dengan melaksanakan program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu melalui indikator program persentase peningkatan produksi kopi, tebu, kelapa dengan capaian 3,10% sesuai target (100%) dan indikator kegiatan fasilitasi sarana penanaman dan intensifikasi tebu dengan capaian 350 ha sesuai target (100%). Upaya pencapaian target peningkatan produksi tebu yaitu optimalisasi pengembangan kawasan tebu dengan menerapkan metode bongkar ratoon sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan fasilitasi dukungan pemasaran agar bernilai jual tinggi untuk meningkatkan minat petani.

g. Capaian Indikator Sasaran Kopi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023 (Ton)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Kopi	26.549	22.093	26.213	118,65	22.629	115,84

Indikator kinerja sasaran produksi kopi tercapai 26.213 ton dari target 22.093 ton (118,65%). Produksi kopi telah tercapai melebihi target dikarenakan meningkatnya minat petani menanam kopi dan permintaan pasar yang semakin tinggi, serta iklim yang mendukung pertumbuhan sehingga meningkatkan produksi kopi. Upaya pencapaian target kinerja sasaran tersebut dengan melaksanakan program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu melalui indikator program persentase peningkatan produksi kopi, tebu, kelapa dengan capaian 3,10% sesuai target (100%) dan indikator kegiatan fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kopi dengan capaian 100 ha sesuai target (100%).

#### h. Capaian Indikator Sasaran Kelapa

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023 (Ton)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Kelapa	170.688	166.724	170.061	102,00	167.558	101,49

Indikator kinerja sasaran produksi kelapa tercapai 170.061 ton dari target 166.724 ton (102,00%). Produksi kelapa telah tercapai melebihi target dikarenakan adanya varietas baru yaitu kelapa genjah dan kelapa hibrida yang sudah memasuki umur tanaman menghasilkan sehingga meningkatkan produktivitas. Upaya pencapaian target kinerja sasaran tersebut dengan melaksanakan program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu melalui indikator program persentase peningkatan produksi kopi, tebu, kelapa dengan capaian 3,10% sesuai target (100%) dan indikator kegiatan fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kelapa dengan capaian 100 ha sesuai target (100%).

## 2. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kemampuan SDM Pertanian dan Perkebunan

**Tabel 3.2**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (Orang)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023 (Orang)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target (Orang)	Realisasi (Orang)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Peningkatan SDM Pertanian	2.760	3.600	3.600	100	3.690	97,56
<b>Persentase Capaian Sasaran Strategis</b>					<b>100%</b>		<b>97,56%</b>

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya peningkatan kemampuan SDM pertanian dan perkebunan tercapai sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2023 tercapai sebesar 97,56% dengan kategori sangat baik. Realisasi indikator kinerja jumlah peningkatan SDM pertanian telah terlaksana sebanyak 3.600 orang sesuai target.

## 3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel 3.3**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Kepuasan Masyarakat	82,75	63,50	83	130,71	64	129,69
<b>Persentase Capaian Sasaran Strategis</b>					<b>130,71%</b>		<b>129,69%</b>

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah telah tercapai

melebihi target sebesar 130,71% atau kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2023 tercapai sebesar 129,69% dengan kategori sangat baik. Indikator kinerja nilai kepuasan masyarakat tercapai sebesar 83 yang melebihi dari target 63,50. Hal ini dipengaruhi oleh tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah.

#### 4. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

**Tabel. 3.4**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai SAKIP Distanbun	80,17	76	81,37	107,07	76,20	106,78
<b>Persentase Capaian Sasaran Strategis</b>					<b>107,07%</b>		<b>106,78%</b>

Dari tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah tercapai melebihi target sebesar 107,07% dengan kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2023 tercapai sebesar 106,78% dengan kategori sangat baik. Indikator kinerja nilai SAKIP tercapai sebesar 81,37 yang melebihi dari target 76. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah.

## IV. REALISASI ANGGARAN

### 4.1 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan pada Tahun Anggaran 2022 didukung oleh Anggaran APBD dan APBN sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Penggunaan Anggaran APBD Tahun 2022**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Realisasi</b>
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.762.295.000	91.812.075.822	96,89
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	78.576.307.000	73.354.169.975	93,35
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.044.440.000	7.647.201.550	95,06
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	10.604.413.000	1.417.226.713	92,72
Penyuluhan Pertanian	1.528.572.000	10.561.408.802	99,59
<b>Jumlah</b>	<b>193.516.027.000</b>	<b>184.792.082.862</b>	<b>95,49</b>

Berdasarkan tabel 4.1 di atas tertera anggaran APBD sebesar Rp193.516.027.000,- dengan realisasi keuangan Rp184.792.082.862,- atau 95,49% dan realisasi fisik tercapai 100%. Anggaran tidak terserap sebesar Rp8.723.944.138,- atau 4,51%.

**Tabel 4.2**  
**Penggunaan Anggaran APBN Tahun 2022**

<b>Program</b>	<b>Dekonsentrasi</b>		
	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Serapan (Rp)</b>	<b>% Serapan</b>
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	570.448.000	569.872.256	99,90
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	24.588.225.000	24.322.386.095	98,92

Program	Dekonsentrasi		
	Anggaran (Rp)	Serapan (Rp)	% Serapan
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	34.987.762.000	34.457.494.606	98,48
Program Dukungan Manajemen	4.248.310.000	4.178.890.298	98,37
<b>Jumlah DK</b>	<b>64.394.745.000</b>	<b>63.528.643.255</b>	<b>98,66</b>
Program	Tugas Pembantuan		
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	19.548.006.000	18.990.531.835	97,15
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	147.951.312.000	142.298.169.436	96,18
Program Dukungan Manajemen	6.695.498.000	6.554.198.165	97,74
<b>Jumlah TP</b>	<b>174.194.816.000</b>	<b>167.832.899.436</b>	<b>96,35</b>
<b>Total Anggaran (DK+TP)</b>	<b>238.589.561.000</b>		
<b>Total Serapan (DK+TP)</b>	<b>231.361.542.691</b>		
<b>% Serapan APBN</b>	<b>96,97</b>		

Berdasarkan tabel 4.2 di atas tertera anggaran APBN sebesar Rp.238.589.561.000,- dengan realisasi keuangan Rp.231.361.542.691,- atau 96,97% dan realisasi fisik tercapai 100%. Rincian alokasi anggaran APBN Dekonsentrasi sebesar Rp.64.394.745.000,- dengan realisasi keuangan Rp.63.528.643.255,- atau 98,66% dan realisasi fisik tercapai 100%, sedangkan anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp.174.194.816.000,- dengan realisasi keuangan Rp.167.832.899.436,- atau 96,35% dan realisasi fisik juga tercapai 100%.

#### 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ditargetkan pendapatan sebesar Rp.14.394.105.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.390.977.383,- atau mencapai 93,03%.

## V. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumberdaya yang mendukung pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan meliputi kondisi iklim, sumberdaya lahan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

### 1. Kondisi iklim yang mendukung budidaya pertanian dan perkebunan

Produk pertanian dan perkebunan merupakan produk yang sangat bergantung pada kondisi iklim. Faktor iklim berpengaruh pada pola tatanan agroekosistem. Kondisi seperti ini bisa diprediksi dan telah dipersiapkan, namun tidak dapat dipastikan keakuratannya.

Pada Tahun 2022 terjadi musim kemarau basah yang menunjang pada pertumbuhan vegetatif tetapi mengganggu pertumbuhan generatif sehingga produksi pertanian dan perkebunan terutama tanaman hortikultura mengalami penurunan produktivitas. Sedangkan untuk tanaman pangan mengalami pergeseran masa tanam yang menyebabkan mundurnya jadwal tanam.

### 2. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi di Jawa Tengah mempengaruhi tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat tinggal dan fasilitas lainnya akan semakin terus bertambah. Permasalahan alih fungsi lahan diharapkan lebih terkendali dengan penerapan Perda RT RW maupun Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bukan hanya masalah penegakan hukum yang harus diperhatikan terkait masalah ini, namun bagaimana mengupayakan lahan-lahan yang ada dapat memberikan pendapatan yang lebih menjanjikan ketika dimanfaatkan untuk budidaya pertanian. Apabila kondisi demikian tetap dibiarkan akan mempengaruhi perkembangan pertanian ke depan.

### 3. Sumber daya manusia

Permasalahan dalam pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah diantaranya yaitu terdapat perubahan sosial budaya masyarakat di pedesaan dari masyarakat budidaya pertanian menjadi masyarakat budidaya industri. Hal ini terlihat dari penurunan penyerapan

tenaga kerja di sektor pertanian diikuti dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja disektor non pertanian terutama sektor industri maupun jasa. Selain lahan pertanian yang semakin sempit juga karena tingkat pendidikan masyarakat semakin meningkat. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang maka cenderung untuk memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya tersebut.

#### 4. Sarana Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana pertanian di Jawa Tengah belum memadai. Jaringan irigasi dan pengairan masih banyak kerusakan. Selain itu sarana pendukung pertanian juga kurang, seperti alat, mesin pra dan pasca panen. Melalui program pengembangan kawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perbaikan jaringan irigasi dan fasilitasi bantuan alat mesin pertanian telah terlaksana dengan baik dan terus ditingkatkan.

## **VI. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN**

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perkebunan, mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pembinaan dan fasilitasi bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, usaha pertanian dan penyuluhan pertanian; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan pengelolaan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berbagai program dan kegiatan yang teralokasi melalui pendanaan APBD dan APBN terukur melalui indikator kinerja utama. Keberhasilan tersebut terwujud dalam peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkelanjutan. Perwujudan ini didukung oleh berbagai upaya seperti efisiensi tenaga kerja manusia, peningkatan indeks penanaman, peningkatan produktivitas, pengamanan produksi dari gangguan OPT, perbaikan penanganan panen dan pasca panen, peningkatan nilai jual melalui orientasi kualitas dan pasar, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang pertanian dan perkebunan.

## VII. PENUTUP

### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan skala pengukuran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis, nilai kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan secara umum sangat baik dalam "Memantapkan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai Wujud Kontribusi Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah." Artinya Dinas Pertanian dan Perkebunan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi dari stakeholder secara keseluruhan untuk melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan yang akuntabel dan transparan. Peningkatan ketangguhan sektor pertanian Jawa Tengah sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak terjadinya pandemi covid 19. Hal ini dilakukan melalui kebijakan sektor pertanian yang fokus pada upaya pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi covid 19.

### 7.2 Saran

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, senantiasa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah. Guna mewujudkan visi tersebut maka Dinas Pertanian dan Perkebunan diperlukan perbaikan dalam hal sebagai berikut:

1. Sistem peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berkelanjutan, peningkatan efisiensi dalam usaha pertanian, dan sistem peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Sistem pengendalian internal dengan pemetaan resiko masing-masing kegiatan di semua bidang lingkup dinas, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak pada pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan baik.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Provinsi Jawa Tengah

